

**ANALISIS KOMPILAS HUKUM ISLAM (KHI)
TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN TAKLIK
TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum**

Oleh

CICI APRILIA

NPM : 1321010037

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

INSTITUT AGAMA ISAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1438H/2017M

ABSTRAK

Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap isterinya, maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang telah di ikrarkan terjadi maka isteri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama dan apabila alasannya terbukti maka Hakim akan memutuskan perkawinannya. Dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1). Apakah yang menjadi dasar hukum putusan Hakim dalam perkara gugatan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. 2). Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam tentang putusan Hakim dalam perkara pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang

Penelitian ini menganalisis putusan-putusan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dengan tujuan untuk diketahui dasar hukum putusan Hakim pada putusan-putusan perkara gugatan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dan untuk diketahui analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang putusan Hakim dalam perkara pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Sehingga menjadi fokus kajian untuk diketahui motivasi, alasan, dan tujuannya dan dapat dicari solusi yang tepat untuk di atasi atau dicegah terjadinya pelanggaran yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini adalah penelitian *library reaserch* (penelitian pustaka), yaitu suatu penelitian yang menelaah dari berbagai macam teori, data-data, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dapat menjadi landasan teori bagi penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pengumpulan data studi pustaka, mengingat penelitian ini merupakan bahan kepustakaan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan hanya metode dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data mengenai

hal-hal atau variable yang berupa dokumen, catatan, transkrip, dan lain-lain yang berhubungan dengan pelanggaran ta'lik talak baik itu bahan primer maupun bahan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian tidak sedikit dari putusan Pengadilan yang mengabulkan perceraian akibat pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara taklik talak No. 0228/ Pdt. G/ 2012/ PA.Tnk, No. 1058/Pdt. G/2013/PA.Tnk, dan No. 0388/ Pdt.G/2014/PA.Tnk adalah Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 51 KHI Pasal 80 ayat (2) KHI, Pasal 80 ayat (4) KHI, Pasal 113 KHI, Pasal 113 KHI dan Pasal 116 huruf g. Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang tentang pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian, setelah dianalisis sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang diketahui berdasarkan alasan-alasan Penggugat sesuai dengan bukti dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil maupun materil, dan hal-hal lain yang menjadi pertimbangan Hakim bahwa suami terbukti telah melanggar shigat taklik talak.





**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Cici Aprilia

NPM : 1321010037

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

**Judul Skripsi : ANALISIS KOMPILAS HUKUM ISLAM (KHI)
TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN
TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG
KARANG)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II,

Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Marwin, S.H., M.H
NIP. 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS KOMPILAS HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG)**, disusun oleh **Cici Aprilia**, NPM. 1321010037, Program Studi: Ahwal Al-Syakhshiyah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2017.

Ketua

Marwin, S.H., MH

Sekretaris

Arif Fikri, S.H.I., M. Ag.

Penguji I

Hj. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H.

Penguji II

Nurnazli, S.H., S. Ag., M.H.

TIM PENGUJI

القرآن الكريم

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

16 MARET 2017

16 MARET 2017

16 MARET 2017

16 MARET 2017

16 MARET 2017

16 MARET 2017

16 MARET 2017

16 MARET 2017

16 MARET 2017

16 MARET 2017

16 MARET 2017

16 MARET 2017

16 MARET 2017

16 MARET 2017

16 MARET 2017

16 MARET 2017

16 MARET 2017

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ
وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S Al-Mujadalah:1)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabul Nuzul* (Banjar Sari Sukarta: cet ke-10, CV. Al-Hanan, 2009), h.109

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan saya kekuatan, dan menuntunku dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. *Murobbil Jismi* yaitu Bapak dan Ibu (Halimah dan Syamsudin) tercinta yang dengan tulus ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidiku dan selalu memberi kasih sayang serta meneguhkan keyakinanmu dikala aku tersesat dan putus asa.
2. *Murobbil Rūh* yaitu para Kyai, Dosen, Guru, dan Ustadz, khususnya ibu Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag dan bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah mengajarkan ilmu untuk menuju kemuliaan di sisi Allah SWT.
3. Adik-adikku tercinta Muhammad Reynaldi Sanprima dan Ahmad Fudholi yang selalu mendukung untuk kesuksesanku.
4. Sahabat dekatku Ahmad Al-Fhariedzi N yang selalu mendukung untuk kesuksesanku.
5. Seluruh rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu.
6. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Cici Aprilia di lahirkan di desa Cileungsi, Bogor pada tanggal 05 April 1995, anak pertama dari tiga saudara, dari pasangan Ayah Samsuddin dan Ibu Halimah.

Pendidikan Penulis dimulai dari TK Daarul Ishlah di desa Jayanti, lulus pada tahun 2001, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri Cikande III tahun 2001 dan lulus tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan Mts ke Pondok Pesantren Daarul Falah, lulus pada tahun 2010, kemudian tetap melanjutkan di MA Pondok Pesantren Daarul Falah. Selama menjadi santriwati di Pondok Pesantren Daarul Falah Penulis mengikuti organisasi intra sebagai anggota osis, dan pada kelas dua Aliyah Penulis pernah menjabat sebagai salah satu anggota Pemerhati Bahasa (Arab dan Inggris) di Pondok Pesantren Daarul Falah, dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal An-Nyakhsiyah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, Pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan segala nikmat baik nikmat Iman, Islam maupun nikmat jasmani dan rohani. Shalawat beriring salam di sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya terdapat kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika mendapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan keterbatasan ilmu pengetahuan dalam penelitian. Karenanya saran, koreksi, dan kritik yang mendukung sangatlah diharapkan. Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu di hantarkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Serta para Wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
3. Marwin S.H. M.H. selaku ketua jurusan Ahwal AL-Syakhsiyyah dan bapak Gandhi liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag selaku sekretaris Jurusan Ahwal AL-Syakhsiyyah IAIN Raden Intan Lampung .
4. Nurnazli S.H.,S.Ag.,M.,Ag selaku pembimbing I dan bapak Gandhi liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan fikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, dan Pegawai Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku, adik-adikku, terimakasih atas do'a, dukungan dan semangatnya. Semoga Allah

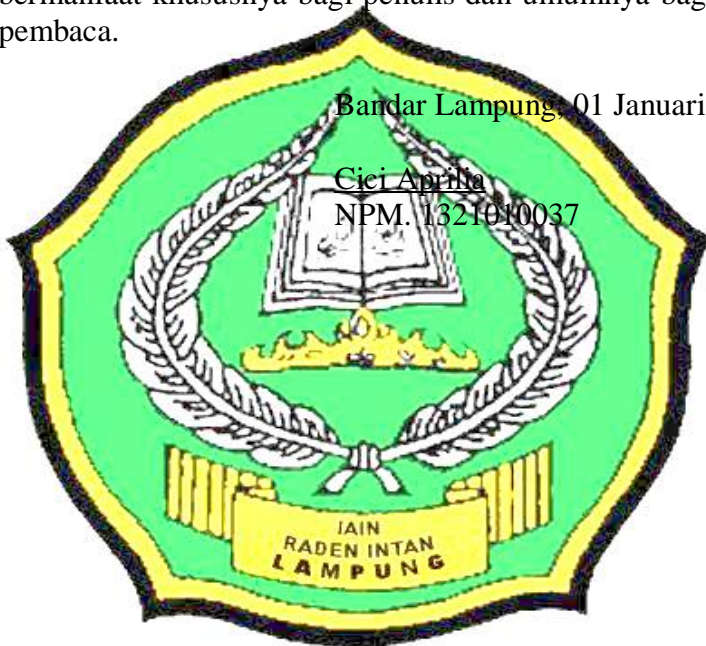
membalasnya serta memberi keberkahan kepada kita semua.

7. Sahabat-sahabat Mahasiswa Jurusan Ahwal AL-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah angkatan 2013 serta kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkat keluarga besar Jurusan Ahwal AL-Syakhsiyyah yang telah sama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 01 Januari 2017

Cici Aprilia
NPM. 1321010037



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Metode Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN TAKLIK TALAK SECARA UMUM ...	11
1. Pengertian Talak	11
2. Macam-macam Talak	13
3. Pengertian Taklik Talak	18
4. Macam-macam Taklik Talak	19
5. Dasar Hukum Taklik Talak	21

B.TUJUAN TAKLIK TALAK MENURUT

KOMPILASI HUKUM ISLAM	29
1. Sejarah Taklik Talak.....	29
2. Eksistensi Taklik Talak	32
3. Rumusan Perjanjian Taklik Talak	38
4. Pengaruh Taklik Talak Terhadap Kedudukan Wanita dalam Rumah Tangga	40
5. Taklik Talak di Tinjau dari Segi Kompilasi Hukum Islam	44

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA

TANTUNG KARANG TENTANG PERKARA TAKLIK TALAK

A. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama dalam Perkara Taklik Talak	47
B. Gugatan Tentang Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang.....	49
1. Kasus Posisi Gugatan Perkara No.0228/Pdt.G/2012/PA.Tnk.....	49
2. Kasus Posisi Gugatan Perkara No.1058/Pdt.G/2013/PA.Tnk.....	52
3. Kasus Posisi Gugatan Perkara No.0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk.....	54

BAB IV ANALISIS KHI TENTANG PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG

A. Dasar Pertimbangan Hukum/Yuridis	59
1. Perkara No.0228/Pdt.G/2012/PA.Tnk	59
2. Perkara No.1058/Pdt.G/2013/PA.Tnk	59
3. Perkara No.0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk	60
B. Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Putusan Hakim mengenai Pelanggaran Taklik Talak.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “ ANALISIS KOMPILAS HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG)” untuk menghindari kesalah fahaman dan pengertian dari judul skripsi ini, maka akan dijelaskan dan diartikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara).²
2. Putusan : Hasil (Putusan hukum: putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara).³
3. Pelanggaran : Perbuatan (perkara) melanggar.⁴
4. Taklik talak : Putus hubungan sebagai suami isteri.⁵
5. Alasan : Dasar, asas, hankat.⁶
6. Perceraian: Perpisanan (perihal bercerai) antara suami isteri), perpecahan.⁷

Jadi maksud dari ANALISIS KOMPILAS HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Edisi Ke-4, Departemen Pendidikan Nasional), h.58

³ *Ibid*, h.1124

⁴ *Ibid*, h.783

⁵ *Ibid*, h.261

⁶ KBBi Online, <http://ebsoft.web.id>.

⁷ KBBi Online, <http://ebsoft.web.id>.

TANJUNG KARANG))” pelanggaran taklik talak adalah suatu alasan perceraian antara suami- isteri yang di ajukan oleh isteri kepada Pengadilan Agama yang berwenang untuk diadakan suatu penyelidikan untuk mendapatkan hasil putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara mengenai pelanggaran shigat taklik talak atau suatu pelanggaran yang dapat memutus hubungan suami-isteri.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dalam memilih judul adalah :

1. Alasan objektif
persoalan ini merupakan persoalan yang menarik untuk di kaji, hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan yang pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian yang menjaga nilai-nilai luhur perkawinan, namun pada realitanya angka perceraian semakin meningkat di antaranya akibat pelanggaran taklik talak.
2. Alasan subjektif
 - a. Judul yang dipilih belum ada yang membahas, khususnya lingkungan fakultas IAIN Raden Intan Lampung.
 - b. Referensi yang terkait dalam objek yang di teliti cukup menunjang untuk dilaksanakan penelitian
 - c. Relevan dan disiplin ilmu berkesesuaian dengan penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad S.A.W bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه).

Dari Abdullah bin Mas'ud Radialahluta'ala ia berkata : Rasulullah S.A.W berkata kepada kami : wahai segenap pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, sesungguhnya pernikahan merundukan mata dalam pandangan, menjaga farji, dan siapa diantara kalian yang belum mampu maka sebaiknya ia berpuasa, maka dengan puasa akan menjaganya.⁸(Muttafaqun a'laih).

Berdasarkan hadits di atas dijelaskan bahwa bagi siapa saja umat Islam yang sudah mampu untuk membangun rumah tangga maka di anjurkan baginya untuk melaksanakan suatu perkawinan. Namun dalam realitas keberlakuannya dalam masyarakat muslim di Indonesia akhir-akhir ini sangat mudah sekali terjadi perkawinan dan demikian juga perceraian sehingga timbul kesan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk cerai.

Mengenai perkara baik itu perkawinan atau perceraian, atau perkara-perkara lainnya yang menyangkut dengan hukum keluarga Islam dalam kehidupan masyarakat Islam, baik itu mengenai norma atau kaidah yang terkandung dalam masyarakat Islam di implementasikan dalam bentuk aturan pokok yang di sebut Syari'at Islam.

Upaya mewujudkan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum positif memerlukan proses formulasi kedalam bentuk aturan Perundang-Undangan.

Pada pendahuluan pasal 38 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VIII Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.⁹ Putusnya perkawinan karena perceraian di Indonesia pada umumnya

⁸ Hafidz bin Hajar Asqlani, *Bulughul Marram* (Daarul Ahya Al-Islamiyyah, 258 H), h.200

⁹ Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 38

menggunakan lembaga cerai talak, namun tidak sedikit dari masyarakat yang putus hubungan perkawinannya karena putusan Pengadilan, di antaranya ialah gugat cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak.

Ini juga tertera dalam lafadz shigat talak yang diucapkan suami setelah ijab qabul dan apa bila suami melanggar taklik talak yang telah di ucapkan itu dapat menjadi dasar seorang isteri mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak.

Pembacaan taklik talak oleh suami di hadapan para saksi dan juga oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) di hadapan semua orang dan juga mempelai wanita itu sendiri di ucapkan secara sukarela namun dari segi kekuatan hukum isteri telah dibenengi oleh alat-alat bukti berupa catatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), saksi-saksi, dan masyarakat yang hadir dalam proses pernikahan itu.

Pada saat suami melanggar taklik talak atau pada saat suami tidak melaksanakan kewajibannya baik itu nafkah, meninggalkan isteri dia tahun berturut-turut atau menyakiti badan isteri tersebut, isteri berhak mengadukannya kepada Pengadilan Agama maupun petugas lembaga taklik talak itu sendiri.

al-Qur'an surat an-Nisa: 128

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz¹⁰ atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya¹¹, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.¹² Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas seorang isteri yang merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah baik dalam percakapan maupun perbuatan dari suaminya seperti yang pernah dirasakan sebelumnya, dan hal tersebut di khawatirkan dapat mengantarkan kepada perceraian maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.

Menurut Sayuti Thalib ayat ini merupakan dasar untuk merumuskan tata cara dan taklik talak merupakan suatu perjanjian dalam perkawinan. Taklik talak yaitu suatu talak yang di gantungkan jatuhnya jika terjadi suatu hal yang memang mungkin terjadi, yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian yang telah di perjanjikan sebelumnya.¹³

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan ini ada dua pengertian yang harus dipahami

¹⁰ *Al-qur'an terjemah*, Kementrian Agama RI, (Bogor: Syigma, 2007), h.99

Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

¹¹ *Ibid*, Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi asalkan suaminya mau kembali.

¹² *Ibid*, Tabiat manusia itu tidak mau melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, kendatipun demikian isteri melepaskan haknya, maka boleh suami menerimanya.

¹³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), h.118

yaitu “bubarnya perkawinan” dan istilah “perceraian” perceraian adalah salah satu sebab dari bubarnya perkawinan.

Alasan perceraian menurut kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan-alasan perceraian adalah:

1. Kematian
2. Perceraian ; dan
3. Atas putusan Pengadilan¹⁴

Undang- Undang Perkawinan pada dasarnya mempersulit adanya perceraian, alasan Undang- Undang mempersulit perceraian adalah:

- a. Perkawinan mempunyai tujuan suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah hal perbuatan yang dibenci oleh Tuhan (Allah);
- b. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap isteri; dan
- c. Untuk mengangkat derajat dan martabat isteri (wanita) sehingga setara dengan derajat dan martabat suami (pria).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu untuk diadakannya penelitian mengenai putusan Hakim dalam pelanggaran taklik talak. Dilaksanakannya analisis tentang pelanggaran taklik talak atas putusan Hakim di Pengadilan Agama agar mengetahui lebih dalam bagaimana ijtihad dan dasar hukum Hakim dalam memutus suatu perkara mengenai pelanggaran taklik talak.

Penelitian ini menganalisis putusan-putusan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dengan tujuan agar mengetahui dasar hukum Hakim dalam mengambil putusan pelanggaran taklik talak dan mengetahui perkembangan masalah taklik talak sehingga menjadi fokus kajian untuk diketahui motivasi, alasan, dan tujuannya sehingga dapat dicari solusi yang tepat

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* ,(Jakarta.: Akademika Pressindo Indonesia, 2010), h.76

untuk di atasi atau dicegah terjadinya pelanggaran yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada dasarnya Allah SWT membenci perceraian dan di laksanakannya pengucapan shighat taklik talak bertujuan untuk menjaga isteri dari kesewenangan suami bukan untuk dijadikan senjata ketika ada hal permasalahan dalam rumah tangga yang di akhiri dengan perceraian.

Berdasarkan pemaparan di atas maka sangat perlu untuk dilakukan penelitian mengenai putusan Hakim dalam pelanggaran taklik talak yang kemudian diangkat menjadi skripsi yang berjudul "ANALISIS KOMPILAS HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1A TANJUNG KARANG)".

D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dirumuskan beberapa masalah:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum putusan Hakim dalam perkara gugatan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang?
2. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam tentang putusan Hakim dalam perkara pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dasar hukum putusan yang di putuskan Hakim pada putusan-putusan perkara gugatan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.
 - b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang putusan Hakim dalam perkara pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perkawinan tentang gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak. Penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada masyarakat mengenai apa itu taklik talak dan akibat hukumnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini di tujukan kepada kalangan praktisi hukum, khususnya hukum Islam tentang gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak, sebab hukum akibat taklik talak.

G. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Penelitian ini adalah penelitian *library reaserch* (penelitian pustaka)¹⁵, yaitu suatu penelitian yang menelaah dari berbagai macam teori, data-data, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dapat menjadi landasan teori bagi penelitian. Yang mana objek penelitiannya yaitu sumber-sumber dalam hukum perdata Islam yang membahas tentang masalah perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak.

b. Kemudian sifat analisis ini yaitu deskriptif analitis,¹⁶ Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi/gambaran secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan unsur-unsur yang ada dalam fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan

53 ¹⁵ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h.

¹⁶ Chaolid Narbuko. Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2007), h.45

di gambarkan bagaimana putusan Hakim mengenai pelanggaran taklik talak dalam suatu hubungan rumah tangga oleh putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung.

2. Sumber data

Sumber data adalah tempat dimana data itu di peroleh. Adapun sumber data penelitian ini adalah:

Sumber data skunder yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer yang mengenai pelanggaran taklik talak yaitu data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung. Kemudian di lengkapi dengan data-data dari sumber lain seperti buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Metode pengumpulan data

Pada penelitian ini digunakan pengumpulan data studi pustaka, mengingat penelitian ini merupakan bahan kepustakaan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan hanya metode dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa dokumen, catatan, transkrip, dan lain-lain yang berhubungan dengan pelanggaran ta'lik talak baik itu bahan primer maupun bahan sekunder.¹⁷

4. Metode pengelolaan data

1. Editing

Yaitu pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu baik dan dapat dipersiapkan untuk keperluan berikutnya.

2. Penandaan data (coding)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, atau

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 103

dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis penerbit, tahun penerbit).¹⁸

3. Sistemazing atau sistematis

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu pengelompokan data secara sistematis data yang sudah di edit dan di beri tanda menurut klasifikasi dan rumusan masalah.¹⁹

5. Metode analisis data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Dalam analisis kualitatif digunakan metode deduktif yaitu berangka dari pengetahuan yang bersifat umum dan dengan bertitik tolak dengan pengetahuan umum yang menilai kejadian yang khusus.²⁰



¹⁸ Abdul Kadir Muhammadd, *Hukum dan Penelitian*, (Bandar Lampung: Citra Aditiya), h.126

¹⁹ *Ibid*, h.126

²⁰ Saiffuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), h.40

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN TAKLIK TALAK SECARA UMUM

1. Pengertian Talak

Agama Islam adalah agama yang selalu relevan di setiap zaman dan tempat, Islam tidak menyulitkan pemeluknya dalam meraih kebahagiaan dan kehidupan di dunia. Dengan syarat mereka tetap berpegang teguh kepada ajaran dan hukum-hukumNya.

Salah satu kebahagiaan anak Adam adalah menjalankan suatu perkawinan dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah mawaddah warohmah dengan keturunan yang baik lagi bagus. Namun fenomena di dalam masyarakat kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah mawaddah warohmah ternyata karena satu dan lain hal harus kandas di tengah jalan.

Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi di damakan maka Islam memberi solusi dengan perceraian atau talak.

Perceraian atau talak merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya. Kendati dibolehkan sesungguhnya Allah membenci perceraian atau talak. Salah satu alasan perceraian yang sering terjadi adalah karena pelanggaran shigat taklik talak.

Mengenai pengertian talak sendiri menurut bahasa, talak berasal dari bahasa arab yaitu “اطلاق” yang berarti melepaskan atau meninggalkan, ada bahasa dalam bahasa arab seperti “naqah thaliq yang di maksud yaitu unta yang

terlepas tanpa di ikat”²¹. Dengan kata lain talak memiliki artian lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.

Lafadz talak sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Penduduk arab jahiliyah melakukannya ketika melepas tanggungan dan di batasi sebanyak tiga kali.

Di riwayatkan dari Urwah bin Zubair Rasulullah S.A.W.berkata: “Dulu ada manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan.” Seseorang yang mentalak isterinya, ketika mendekati habis masa menunggu ia kembali kemudian mentalak lagi dengan maksud menyakiti wanita²².

Maka dari itu turunlah surah al-Baqoroh ayat 229:



أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ فَامْسَاكِ مَعْرُوفٍ أَوْ سَتَرِخٍ بِإِحْسَنِ
وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا
أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُبَيِّنَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

²¹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (khitbah, nikah dan talak)*, (Jakarta: Amzah, 20014), h. 255



Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Sedangkan menurut Al-Jaziri, talak ialah:

الطلاق إزالة النكاح ولو نقصان حلة بلفظ مخصوص

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.²³

Berdasarkan pemaparan di atas talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga antara suami dan isteri tidak ada menghalangi bagi keduanya. Ada beberapa alasan bagi suami isteri melakukan talak (perceraian) salah satunya yaitu akibat pelanggaran oleh suami terhadap shigat talik talak.

2. Macam-macam talak

a. Ditinjau dari segi waktu di jatuhkannya, maka talak di bagi atas tiga macam, yaitu:

1) Talak Sunni²⁴

²³ Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat (kajian fikih nikah lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 230

²⁴ Slamet Abidin *op. cit.*, h.41

yaitu suatu talak yang di jatuhkan sesuai tuntunan sunnah, ada empat syarat dalam talak sunni, yaitu:

- a) Isteri yang di talak sudah di gauli, dan jika belum di gauli maka tidak termasuk talak sunni.
 - b) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah di talak, maksudnya ia lah ia dalam keadaan suci dari haid, karena menurut ulama Syafi'iyah jumlah iddah seorang wanita ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
 - c) Talak yang di jatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci.
 - d) Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci talak itu di jatuhkan.
- 2) Talak Bid'i²⁵
- yaitu talak yang di jatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan sunnah yang di maksud dengan talak bid'i ialah:
- a) Talak di jatuhkan pada waktu istri menstruasi.
 - b) Talak di jatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci tetapi dalam keadaan suci tersebut pernah di gauli.
- 3) Talak Sunni wal bid'i
- yaitu suatu talak yang tidak termasuk talak sunni dan talak bid'i kriteria talak sunni wal bid'i ialah:
- a) Talak di jatuhkan kepada isteri yang belum pernah di gauli.
 - b) Talak di jatuhkan pada isteri yang belum pernah haid, dan atau yang telah lepas haid.
 - c) Talak di jatuhkan pada isteri yang sedang hamil.

b. Ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang di gunakan dalam talak terbagi menjadi dua macam. Yaitu:

²⁵ Slamet abiding *Op. Cit*, 41

1). Talak Sharih/ Dzohir

yaitu: kata-kata yang digunakan jelas dan tegas, dapat dengan mudah dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai ketika diucapkan.

Menurut Ahl Al-Zhahiriyah talak tidak jatuh kecuali dengan menggunakan tiga kata: talak, firoq, dan sarah.

Beberapa contoh talak saraih ialah seperti suami berkata kepada isterinya:

- a) Engkau saya talak sekarang juga, engkau saya cerai sekarang juga.
- b) Engkau saya firaq sekarang juga, engkau saya pisahkan sekarang juga.
- c) Engkau saya sarah sekarang juga, engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami mengucapkan talak kepada isterinya dengan talak saraih maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang suami dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan atau apapun.²⁶

2). Talak kinayah

yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran seperti:

- 1. Engkau sekarang telah jauh dariku
- 2. Selesaikan sendiri segala urusanmu
- 3. Susullah keluargamu sekarang juga
- 4. Engkau sekarang telah bebas merdeka hidup sendirian.

Ucapan-ucapan tersebut dimaksudkan dengan talak atau bias juga mengandung makna lain. Menurut Taqiyuddin Al-husaini itu tergantung kepada niat suami, artinya jika

²⁶ Slamet abiding *Op. cit* h,195

sumi mengatakan itu dengan maksud talak maka jatuhlah talak itu, dan jika suami tidak dengan maksud mentalak maka tidak jatuh talak.

c. Ditinjau dari segi bisa atau tidaknya rujuk kembali bagi suami kepada bekas isteri maka talak terbagi menjadi dua yaitu: talak raj'i dan talak bai'n.

1). Talak raj'i yaitu

Untuk kembalinya bekas isteri kepada bekas suami tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, mahar dan persaksian.

Setelah terjadinya talak raj'i isteri wajib beriddah namun bila mantan suami hendak kembali sebelum masa iddah berakhir maka hal itu dapat dilakukan dengan pernyataan rujuk, tetapi jika sampai akhir masa iddah suami tidak menyatakan rujuk maka dengan berakhirnya masa iddah kedudukan talak ini menjadi talak bai'n.

2). Talak bai'n, yaitu²⁷

Talak yang jatuhnya tidak memberi hak rujuk kepada mantan isteri untuk kembali kepada mantan suami. Apabila mantan suami isteri itu hendak kembali maka wajib bagi keduanya mengadakan akad nikah yang baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak bai'n sendiri ada dua macam yaitu:

- a) Talak bai'n sugro ialah talak yang menghilangkan status perkawinan tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin lagi dengan bekas isteri. Yang terasuk talak bain sugro ialah:
- b) Talak sebelum berkumpul.
- c) Talak dengan khulu'

²⁷ Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 61

- d) Talak karena aib (cacat badan), salah seorang dipenjara, penganiayaan, dan lain-lain.
- e) Talak bain kubro yaitu, talak yang menghilangkan status perkawinan dan menghilangkan kehalalan suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya kecuali setelah bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dan cerai secara wajar serta telah selesai menjalankan iddahnya.
- d. Ditinjau dari cara suami menyampaikan talak kepada isteri
- 1). Talak dengan ucapan²⁸
yaitu talak yang diucapkan oleh suami secara langsung di hadapan isteri.
 - 2). Talak dengan tulisan
yaitu talak yang di jatuhkan oleh suami secara tertulis kemudian di baca oleh isterinya dan isterinya tahu maksud isi tulisan tersebut. Dan talak tersebut jatuh meski dengan tulisan.
 - 3). Talak dengan isyarat²⁹
yaitu talak yang di jatuhkan oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat di pandang sebagai alat komunikasi, oleh karena itu isyarat baginya sama kedudukannya dengan ucapan dan ia biasa menjatuhkan talak dengan cara isyarat dan itu di perbolehkan selama maksudnya bertujuan mengatakan talak untuk memutus perkawinan.

Sebagian Fuqoha mensyaratkan, talak bagi tuna wicara dengan isyarat itu hanya di peruntukkan bagi mereka yang buta huruf, sedangkan bagi mereka yang mengenal baca tulis maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat.

²⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam (Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali)*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet Ke-12,1990), h.115

²⁹ Ibid, h.115

4). Talak dengan utusan

Yaitu talak yang di jatuhkan suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami tersebut. Dalam hal ini utusan tersebut berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak tersebut.

3. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak berasal dari dua suku kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa talak yang berasal dari bahasa arab اطلاق memiliki arti yaitu lepas atau bebas, dalam istilah agama talak berarti melepaskan suatu ikatan dalam perkawinan.³⁰ Sedangkan taklik atau muallak yaitu menggantungkan.³¹

Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap isterinya, maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang telah di ikrarkan terjadi maka isteri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama dan apabila alasannya terbukti maka Hakim akan memutuskan perkawinannya. Dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum.³²

Berdasarkan uraian di atas taklik talak bisa di artikan sebagai suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah dipergunakan lebih dulu atau suatu talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat.³³

Buku 1 KHI tentang Perkawinan telah menempatkan taklik talak sebagai perjanjian dan dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak selama itu tidak melanggar hukum Islam.

³⁰ Sayid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 8, Terjemahan Mohamad Thalib*, (Bandung : Al Maarif, 1980), hal 7

³¹ Ibid, h.38

³² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974, cet ke- 1), h. 207

³³ Djamal Latief *Op.cit*, h.119

Mengenai perjanjian perkawinan, Kompilasi Hukum Islam memperinci sebagai berikut:



Pasal 45 berbunyi:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak.
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian di lanjutkan Pasal 46 berbunyi:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah di perjanjikan tidak dapat di cabut kembali.

4. Macam-macam taklik talak

Sayid Sabiq menguraikan dalam Fikih Sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang disebut sebagai taklik talak ada dua macam bentuk :

1. Taklik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Dan taklik talak seperti ini disebut dengan taklik qasami, seperti:
Jika aku keluar rumah maka engkau tertalak, maksudnya adalah suami melarang isterinya keluar rumah ketika ia keluar.

2. Taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat taklik. Taklik seperti ini disebut dengan taklik syarti atau taklik syarat, seperti:

Jika engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharmu, maka engkau tertalak.³⁴

Kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada taklik qasami, suami bersumpah untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada taklik Syarti, suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada istrinya.

Menurut Ibnu Hazm dua jenis taklik talak di atas (taklik qasami dan taklik syarthi) keduanya tidak sah dan ucapannya tidak mengandung akibat apa-apa, dengan alasan bahwa Allah telah mengatur secara jelas mengenai talak. Sedangkan taklik talak tidak ada tuntunannya dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunah.

Tentang taklik bersyarat Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa taklik talak yang berarti janji dipandang tidak berlaku sedang orang yang mengucapkannya wajib membayar kafarat dengan memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka dan jika tidak, maka ia wajib berpuasa selama tiga hari. Mengenai talak bersyarat keduanya berpendapat bahwa talak bersyarat dianggap sah, apabila yang dijadikan persyaratan telah terpenuhi.³⁵

Adapun syarat sahnya taklik talak ada tiga yaitu:

1. Perkaranya belum ada tetapi mungkin terjadi di kemudian hari.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, h.39

³⁵ Sayid Sabiq, *Op. cit* h. 39-40

2. Hendaknya istri ketika lahirnya akad talak dapat dijatuhi thalak (dalam keadaan memenuhi persyaratan untuk di jatuhi talak), umpamanya isteri ada dalam pemeliharaan suami
3. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.³⁶

Talak muallak (taklik talak) seperti ini di sepakati keabsahannya oleh mayoritas Fuqoha.³⁷

5. Dasar Hukum Taklik Talak

Di Indonesia taklik talak telah mendapat tempat yang tidak kurang penting dari talak munaqjaz. Menurut jumhur Ulama taklik talak itu sah, sedangkan menurut pendapat Abu Abdurrahman Ahmad Bin Yahya bin Abdul Aziz bin Asy-talak yang di taklik dengan syarat itu tidak jatuh ataupun sah.³⁸

Taklik talak di Indonesia ini berlainan dengan taklik talak yang ada dalam kitab fikih, yang mana dalam kitab fikih yang menjadi sasaran adalah isteri, seperti suami yang mengatakan kepada isterinya 'jika kamu keluar dari rumah ini, engkau tertalak. Sedangkan dalam versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami.

Pada pasal³⁹ huruf e Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang datang.³⁹

Taklik talak dalam versi Indonesia ini di dasarkan oleh firman Allah surah an-Nisa ayat 128, yang berbunyi:

³⁶ Sayid Sabiq, *Op. cit* h. 38

³⁷ Hasbi Ash-shidiqy, *Hukum Fiqih Islam*, (Bulan Bintang, cetakan ke-IV, 1970), h.296

³⁹ Wan Rijawani, *Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian Suami Isteri*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, 2003)

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Keangkuhan seorang suami yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya, walaupun hanya sikap berpaling. Sikap acuh dari suaminya itu yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan ataupun perbuatan dari suaminya seperti yang pernah dirasakan sebelumnya.

Atas hal tersebut ditakutkan mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.⁴⁰

Shigat taklik talak yang di ucapkan suami kepada isterinya sesudah akad nikah adalah sebagai berikut: "sewaktu-waktu saya:

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, volume 2,(Ciputat: Lentera Hati, 200), h. 579.

1. Meninggalka isteri saya enam bulan berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengadilan itu dan pengaduannya di benarkan serta diterima Pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp 50.00 (lima puluh rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudin memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.⁴¹

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975, bunyi syarat talik talak yang ke (1) diubah kata-kata enam bulan menjadi dua tahun, sehingga berbunyi "meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut" sedang yang lainnya tetap tidak berubah, perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 oktober 1975.⁴²

Mengenai iwadl dasar hukum disyari'atkannya khul'i dalam surat al-Baqarah ayat 229:

⁴¹ Termuat dalam surat nikah

⁴² Djamal latif, *Op.Cit*, h. 63

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Melalui ayat ini Allah membolehkan sang istri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan perceraian.⁴³

Selain itu mengenai iwadl terdapat pula dasar hukum dari hadits, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Shan'ani bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 462

menghadap Rasulullah SAW mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَمْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ مَا لِأَدِينٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ فَقَالَتْ "نَعَمْ" فَقَالَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا. (رواه البخاري والترمذي)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Isterinya Tsabit bin Qais bin Shammas datang kepada Rasulullah SAW, dan berkata: yaa Rasulullah sesungguhnya saya tidak mencela dia (suaminya) didalam masalah akhlak dan agamanya, tetapi saya tidak menyenangi kekufuran di dalam Islam. Rasulullah bertanya: maukah kau mengembalikan kebunnya kepadanya?, perempuan itu menjawab " mau", maka Rasulullah SAW bersabda kepada Tsabit: Terimalah kebunmu itu, dan talaklah isterimu dengan talak satu." (Hadist riwayat Bukhori dan Nasa'i).⁴⁴

Abu Bakar bin Abdul Wahid al-Mazini dalam hal ini membedakan sendiri pendapatnya dari pendapat jumhur Fuqaha, dengan mengatakan bahwa suami tidak boleh mengambil sesuatu apapun dari isteri.

Pendapat beliau selaras dengan firman Allah pada surah an-Nisa ayat 20, yang berbunyi:

⁴⁴ Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, jilid VII, Penerjemah Adib Mustafa, Dkk (Semarang: CV Asy-Syifa, 1994), h.68

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ
 إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتَّانَا
 وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?.

Kebanyakan Para Ulama fikih berpendapat bahwa pengertian ayat ini adalah apabila pengambilan tersebut tanpa kerelaan istri. Beda halnya jika dengan kerelaannya, maka hal itu dibolehkan.⁴⁵

Ayat Al-Qur'an dan Hadits inilah yang menjadi dasar hukum taklik talak dan penerimaan iwadl.⁴⁶ Dan dasar hukum taklik talak sama hukumnya dengan talak tunai (maunajjaz) yaitu makruh. Ini menurut hukum asal, tetapi apabila dengan adanya taklik talak akan membawa pada kerusakan maka hukumnya menjadi haram.⁴⁷

Talak yang di jatuhkan karena pelanggaran taklik talak dilakukan dengan keputusan Pengadilan Agama dan talak yang dijatuhkan selalu talak satu khul'i, karena ada iwadl sehingga

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), h. 490.

⁴⁶ Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Intermedia, 1980), h. 204.

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, Algensindo, 2007), h. 408.

talak tersebut menjadi talak ba'in. Dalam hubungan ini Mahkamah Islam Tinggi dalam keputusannya tanggal 14 maret 1950 No.1 tidak meluluskan jatuhnya talak yang di gantungkan (taklik talak) karena isteri telah meninggalkan suaminya tidak dengan izinnnya.⁴⁸ Tetapi kemudian dalam putusannya pada tanggal 27 november 1950 No.6 Mahkamah Islam Tinggi berpendapat lain, yaitu bahwa nuzyusnya isteri tidak menghalangi atau tidak berhubungan dengan taklik yang mutlak itu.⁴⁹

Peraturan Menteri Agama menjelaskan secara jelas, bahwa taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Seperti yang di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam;
2. Apabila yang di isyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Isteri harus mengadakan persoalannya ke Pengadilan Agama;
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak telah di perjanjikan tidak dapat di cabut kembali.⁵⁰

Pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : Kedua calon mempelai dapat mengadakan perkawinan dalam bentuk :

- a. Taklik talak.
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵¹

⁴⁸ Notosusanto, *Organisasi Dan Jurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1969), h.92

⁴⁹ Ibid, h.92

⁵⁰ Undang- Undang Perkawinan di Indonesia, *Di Lengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Arloka), h. 193

⁵¹ Ibid, 192

Taklik talak dan perjanjian perkawinan dalam KHI diatur Pasal 45 dan 46 secara khusus. Pada Pasal 51 disebutkan bahwa pelanggaran perjanjian tersebut memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan Agama.

Berkenaan dengan perceraian KHI menyebutkan bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XVI Pasal 113 disebutkan bahwa : “perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Putusan Pengadilan

Pada Pasal selanjutnya yaitu Pasal 116 huruf g di sebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

B. TINJAUAN TAKLIK TALAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Sejarah Taklik Talak

Pada masa peperangan VOC di Batavia, para tentara kerajaan Mataram di kerahkan dari Yogyakarta melewati Cirebon untuk menuju Batavia. Namun setelah peperangan selesai para prajurit Mataram banyak yang tidak kembali ke Mataram dan menetap di Batavia (Jakarta) dan menikah kembali dengan perempuan-perempuan di sana sehingga isteri-isteri meraka statusnya terkatung-katung.

Mengenai peristiwa ini, maka ada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah mengenai perkawinan. Menurut catatan sejarah, pelebagaan taklik talak mulai dari pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa-1630 Masehi) bahwa setiap perkawinan disertai dengan taklik dalam rangka melindungi kedudukan isteri dari perlakuan sewenang-wenang suami.⁵²

yang aslinya berbunyi:

Mas penganten, pekenira tompo talik janji dalem, samongso pekanira nambung (ninggal) rabi pekanira..... lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang segoro rong tahun, saliyan nglekoni hayahan dalem, tan terimane rabi pekanira

⁵² Khoirudin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan*, (Jurnal Unisa. Vo XXXI No. 70, 2008), diakses dari <http://journal.Uii.ac.id>, pada tanggal 18 September 2015), h.33

ngantidarbe hatur rapak (sowan) hing pengadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pekanira sawija’.

Yang artinya:

Wahai penganten, dikau memperoleh taklik janji dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan) isterimu bernama..... selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke Pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaanya, maka jatuhlah talakmu satu.

Taklik tersebut tidak dibaca oleh penganten pria, tetapi diucapkan oleh Penghulu (*Naib*) dan cukup dijawab “*hinggi sendika*” (iya, saya terima).

Menurut Zaini Ahmad Noeh, pelembagaan taklik talak yang terjadi pada masa itu merupakan pengembangan pemikiran dan pemahaman Ulama terhadap hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah talak (perceraian).

Setelah Belanda datang ke Indonesia, ketika Snouck Hurgronje membahas masalah hukum adat, ia mengetahui bahwa taklik talak telah berkembang di masyarakat. Karena dalam rangka memuluskan misinya ke Indonesia, yakni misi dagang dan misi penjajahan, Belanda mengambil sikap netral terhadap hukum Islam yang telah berkembang dalam masyarakat.

Pada pemerintahan Hindia Belanda, setelah Daendels mengeluarkan instruksi bagi Bupati tahun 1808, kemudian sebagai bentuk pengakuan Kolonial Belanda terhadap hukum Islam di Indonesia pada tahun 1882 berdasarkan *staatblad* 1882 No. 152 dibentuklah Peradilan Agama yang diberi nama *Priesterraden* atau disebut *Raad Agama* atau *Rapat Agama* atau *Pengadilan Agama* yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam *staadblad* 1882 No. 153.

⁵³ Zaini Ahmad Noeh, *Pembacaan Sighat Taklik Thalaq sesudah Akad Nikah (Dalam Mimbar Hukum, No. 30 Tahun VIII, 1997, h.65*

Untuk pemberlakuan taklik talak, maka keluarlah Ordonansi Pencatatan Perkawinan Stb 1895 jis 1929 No. 348 dan Stb 1931 No. 348, Stb 1933 No. 98 yang berlaku untuk Solo dan Yogyakarta.⁵⁴

Maka dari itu timbullah gagasan para Penghulu dan Ulama dengan persetujuan Bupati untuk membentuk pelembagaan taklik talak sebagai sarana pendidikan bagi para suami agar lebih mengerti kewajibannya terhadap isteri, dengan tambahan rumusan sighat tentang kewajiban nafkah dan tentang penganiayaan suami.

Melihat manfaat taklik talak, maka banyak penguasa yang ada di daerah luar Jawa dan Madura mulai ikut memberlakukannya di daerah masing-masing. Pada tahun 1925 taklik talak sudah berlaku di Minangkabau, sementara di Muara Tembusi berlaku pada tahun 1910, begitu halnya di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan serta Sulawesi Selatan. Terlebih setelah berlakunya Ordonansi Pencatatan Nikah untuk luar Jawa dan Madura, yakni Stb 1932 No. 482.⁵⁵

Pada saat Indonesia merdeka, dengan berlakunya UU No.2 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang sighat taklik talak diberlakukan serentak di seluruh Indonesia, dengan pola saran sidang khusus Bipro Peradilan Agama pada Konferensi Kerja Kementerian Agama di Tretes, Malang tahun 1956.⁵⁶ Dan terakhir setelah UU Perkawinan No.

⁵⁴ Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.51

⁵⁵ Zaini Ahmad Noeh, *Pembacaan Sighat Taklik Thalaq sesudah Akad Nikah (Dalam Mimbar Hukum, No. 30 Tahun VIII, 1997, h. 66*
Sekitar tahun 1925 sudah berlaku taklik talak di daerah Minangkabau, bahkan di Muara Tembusi sudah sejak 1910, begitu juga pula di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Selatan serta Sulawesi Selatan

⁵⁶ Buku Laporan Kementerian Agama 1956, h. 322

1 Tahun 1974 dengan bunyi sighat taklik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990.⁵⁷

2. Eksistensi taklik talak

Eksistensi taklik talak sebagai alasan perceraian banyak perbedaan pendapat di kalangan Ulama. Ada yang membolehkan dan ada pula yang menolaknya, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Perbedaan tersebut sampai sekarang mewarnai perkembangan hukum Islam.

Diantara yang membolehkan pun terdapat dua pendapat. Ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Pada dasarnya perbedaan tersebut terletak pada bentuk sifat dan sighat taklik talak yang bersangkutan.

Pendapat yang pertama, mereka membolehkan secara mutlak semua bentuk sighat taklik, baik yang bersifat syarhi maupun qasami. Mengenai sighat taklik yang bersifat syarhi para Ulama yang membolehkan asalkan itu sesuai dengan maksud tujuan hukum Syar'i.⁵⁸

Secara yuridis mengenai alasan perceraian, pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, keduanya tidak menyinggung mengenai taklik talak sebagai alasan perceraian, hal ini dimaksudkan kedua Pasal itu sudah cukup memadai.

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak ditemukan adanya Pasal yang secara khusus menyebutkan dan mengatur tentang masalah taklik talak sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian. Pada Pasal 29 Undang-Undang ini hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis sebelum melangsungkan perkawinan.

⁵⁷ Khoirudin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan*, (Jurnal Unisa. Vo XXXI No. 70, 2008), diakses dari <http://journal.Uii.ac.id>, pada tanggal 18 September 2015), h. 334-336

⁵⁸ Mahmoud Syaltut, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, terjemahan Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h.218-219

Penjelasan pada Pasal (29) menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud tidak termasuk taklik talak.

Adapun bunyi Pasal (29) secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
- e. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan (Pasal 12 PP No 9 Tahun 1973).⁵⁹

Mengenai alasan perceraian pada UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 juga tidak menyebutkan taklik talak sebagai alasan perceraian.

Alasan Perceraian menurut Undang-Undang ini dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar di sembuhkan.

⁵⁹Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, cet ke- II, 2012), h. 19

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Taklik talak menurut PP No 9 Tahun 1975 mengatur tentang pelaksanaan dari UU No 1 Tahun 1974. Sebagaimana UU No 9 Tahun 1974, Undang-undang ini juga tidak memuat taklik talak sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian.

Mengenai alasan perceraian termuat dalam pasal 19 yang isinya sama persis dengan UU No 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya dan sukar di sembahkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemauannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Mengenai hubungan ini M. Yahya Harahap menyatakan bahwa UU Perkawinan tidak menutup perceraian, pada saat yang bersamaan Undang-Undang juga tidak membuka lebar-lebar pintu perceraian. Oleh karena itu jumlah perceraian harus dibatasi. Apa yang diatur dalam aturan Perundang-Undangan dianggap cukup memadai, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi jika dilihat dari pada Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, dan dikaitkan dengan perluasan alasan melalaikan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan. Alasan perceraian yang kita miliki lebih dari cukup tidak perlu ditambah.⁶⁰

Dilihat dari peraturan Perundangan, maka jelas bahwa taklik talak bukan suatu perjanjian perkawinan.⁶¹ Namun apabila di teliti dengan fakta yang sesungguhnya bahwa tidak sedikit permohonan cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama dengan alasan taklik talak setiap tahunnya, maka dengan itu apakah Pengadilan Agama telah membenarkan alasan perceraian di luar Undang-Undang?.

⁶⁰ M. Yahya harahap, *Tinjauan Masalah Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: FH-UI, 1989), h.4

Melihat sikap Pengadilan Agama yang tampaknya telah membenarkan alasan perceraian di luar Undang-Undang dapat dirumuskan beberapa hal:

1. Taklik Talak di lihat dari segi esensinya sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat dengan tujuan utama untuk melindungi isteri dari kemudharatan atas kesewenangan suami.
2. Taklik talak sebagai alasan perceraian telah melembaga dalam hukum Islam sejak lama. Sebagian besar Ulama sepakat tentang halnya dan sampai sekarang khususnya di Indonesia di realisasikan dalam bentuk perjanjian yang terdapat pada Undang-Undang perkawinan.
3. Substansi shigat taklik talak yang ditetapkan oleh Menteri Agama dipandang telah cukup memadai dipandang dari asas hukum Islam ataupun jiwa Undang-Undang Perkawinan.
4. Di Indonesia, lembaga taklik talak secara yuridis formal telah berlaku sejak zaman Belanda, berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 sampai setelah merdeka. Dan pada saat sekarang, dengan diberlakukannya KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 yang antara lain mengatur tentang taklik talak, maka taklik talak dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis.

Menurut Khoirudin Nasution dalam mimbar hukum yang berjudul “ Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan” ada tiga kesimpulan dari bahasan tersebut. *Pertama*, konsep taklik talak dan/ perjanjian perkawinan telah lama di kenal di Indoneisa, meskipun yang mengenal belum mayoritas, bahkan masih sangat terbatas dikalangan tertentu. *Kedua*, ketersediaan aturan taklik talak dan/ perjanjian perkawinan sejak awal sampai muncul dalam

Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, bertujuan untuk menjamin hak-hak isteri dan melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan tindakan kesewenang-wenangan lelaki (suami). *Ketiga*, meskipun konsep ini sudah lama digunakan, tetapi belum di pahami secara lengkap oleh masyarakat pada umumnya. Minimnya pemahaman terhadap konsep ini disebabkan salah satunya oleh kurangnya sosialisasi, oleh karena itu upaya sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus dan substansial.⁶²

Berdasarkan pemaparan di atas jelas bahwa landasan hukum taklik talak berlaku di Pengadilan Agama karena secara substansial dalam KHI taklik talak dapat dilihat dari dua segi, yakni sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian. Maka dengan itu Hakim harus secara tegas mempertimbangkannya dalam putusannya sehingga dapat menanggulangi dan mempersempit angka perceraian akibat pelanggaran taklik talak.

Terlepas dari apakah taklik talak masuk dalam perjanjian perkawinan ataupun tidak. Pada intinya tujuan past adanya taklik talak telah memberikan suatu hal positif untuk melindungi isteri dari tindakan kesewenangan suami.

Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa taklik talak sebagai alasan perceraian relevan dan dapat dibenarkan menurut hukum.⁶³ Dan kiranya ketentuan mengenai hukum acara dapat dilaksanakan dengan benar, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 62 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, yakni: segala penetapan dan putusan Pengadilan, setelah memuat alasan-alasan atau dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-

⁶² Khoirudin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan*, (Jurnal Unisa. Vo XXXI No. 70, 2008), diakses dari <http://journal.Uii.ac.id>, pada tanggal 18 September 2015

⁶³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Islam Perkawinan (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.153

Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dapat terpenuhi.

3. Rumusan Perjanjian Taklik Talak

Mengenai rumusan perjanjian taklik talak, telah kita ketahui berdasarkan pemaparan di atas bahwasanya para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam pembahasan mengenai taklik talak.

Menurut pendapat Ibn Hazm mengenai taklik talak baik itu taklik qasamy maupun taklik syarhi, keduanya tidak sah dan tidak mempunyai akibat apa-apa. Alasannya karena Allah telah mengatur secara jelas mengenai talak, sedang taklik talak tidak ada tuntunannya dalam Alquran dan Sunnah.⁶⁴

Jumhur Ulama berpendapat bahwa, apabila seseorang suami telah mentaklikkan talaknya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing, maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik, baik taklik qasamy maupun taklik syarhi.⁶⁵

Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Dar al-Fikr, Beirut: 1983), h. 223

⁶⁵ Mahmoud Syaltut, *Op.Cit* h.27

الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرًا

Sayuti Thalib berpendapat bahwa ayat ini sebagai dasar dalam merumuskan tata cara taklik talak.⁶⁶

Pendapat jumbuh inilah yang di anut oleh Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Staatblad 1882 No. 152, bahwa Raad Agama berwenang untuk memeriksa bahwa syarat taklik telah berlaku.

Setelah Indonesia merdeka rumusan taklik talak ditentukan oleh Departemen Agama. Maksudnya untuk membatasi agar bentuk taklik talak tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar adanya keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami.

Sejak tahun 1940 sampai sekarang, rumusan sighat taklik talak telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan itu mengenai kualitas dari syarat taklik yang bersangkutan serta mengenai besarnya iwad.⁶⁷

Perubahan mengenai kualitas syarat taklik talak yang berlaku di Indonesia sejak sebelum merdeka (1940) hingga setelah merdeka, yang ditentukan oleh Departemen Agama, masing-masing pada tahun 1947, 1950, 1956 dan tahun 1975 semakin menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan asas

⁶⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), h. 118

⁶⁷ Arso Sastrodmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975), h.91

hukum Islam yakni mempersulit terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi isteri dari perbuatan sewenang-wenang suami.

Pengaturan sighat taklik oleh Menteri Agama bertujuan untuk menyesuaikan dengan asas-asas hukum Islam tentang perceraian, demikian pula untuk menyesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dengan UU Perkawinan khususnya yang berkaitan dengan alasan perceraian.

Rumusan sighat taklik talak sebagaimana yang terakhir ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1990 juncto sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 46 ayat (2) KHI dianggap telah memadai dan relevan dengan asas-asas tersebut.

Maka dengan kata lain semua bentuk taklik talak selain (di luar) yang ditentukan oleh Departemen Agama Menteri Agama seharusnya dianggap tidak pernah terjadi.

4. Pengaruh Taklik Talak Terhadap Kedudukan Wanita Dalam Rumah Tangga

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, maka perlu diberikan beberapa pengertian dalam penulisan mengenai pengaruh taklik talak terhadap kedudukan wanita dalam rumah tangga.

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan pengertiannya antara lain: (1) pengaruh, (2) taklik talak, (4) kedudukan, (5) wanita, (6) rumah tangga.

1. Pengaruh

Daya yang ada atau sesuatu yang timbul dari (orang, benda) yang dapat membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan (seseorang) atau bentuk dari suatu benda.⁶⁸ Pengaruh merupakan kekuasaan yang

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) edisi ke-empat, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1045

mengakibatkan perubahan perilaku orang lain atau kelompok lain.⁶⁹

2. Taklik talak

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa talak atau ithlaq berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁷⁰ Taklik atau muallak artinya bergantung, atau pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang telah diucapkan.⁷¹

3. Kedudukan

Yang dimaksud dengan kedudukan adalah keadaan yg sebenarnya.

4. Wanita

Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis.

5. Rumah tangga

Sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan di rumah (seperti halnya belanja rumah); atau yang (berkenaan dengan keluarga).⁷²

Maksud dari pengaruh taklik talak dalam kedudukan wanita dalam rumah tangga ialah bagaimana peran aktif taklik talak melindungi wanita dalam kedudukannya sebagai isteri dalam rumah tangga apabila terjadi kesewenangan dari pihak suami terhadap isterinya. Dan mungkinkah Hakim dapat memutuskan

⁶⁹ Artikel diakses pada tanggal 20 Maret 2015 dari <http://cara.pedia.com/pengertian/definisi/pengaruh/info/2117.html>

⁷⁰ Sayid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 8, Terjemahan Mohamad Thalib*, (Bandung : Al Maarif, 1980), h. 7

⁷¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007, cet ke-lima), h.479

⁷² *Ibid*, h.1189

perkawinan di karenakan gugat cerai isteri terhadap suaminya yang melanggar taklik talak?.

Mengenai hal ini kompetensi perceraian dalam sistem hukum positif sepenuhnya berada di tangan Hakim. Pengadilan adalah forum yang dapat memenuhi permohonan cerai dan mengesahkan pembubaran sebuah perkawinan. Walaupun pada hakikatnya dalam hukum Islam diketahui bahwa hakim sama sekali tidak mempunyai hak menjatuhkan talak terhadap istri dalam kondisi apapun.⁷³

Perceraian adalah hak seorang suami asalkan ia berlaku secara wajar terhadap istrinya, maksudnya ialah seorang suami harus mengurus isterinya dengan sepatutnya, menghormati hak-hak isterinya, dan berlaku kasih sayang terhadapnya. Apabila terjadi sesuatu antara keduanya dalam perkawinan dan tidak ada jalan baginya untuk meneruskan kehidupan bersama maka sepatutnya secara patut dan sopan suami menceraikannya.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa dari satu sisi taklik talak dapat mempengaruhi suami untuk konsisten dan bertanggung jawab terhadap isteri dan keluarganya, dan di sisi lain taklik talak memberikan kekuatan hukum terhadap isteri sehingga isteri akan lebih di hargai. Namun masih banyak perbedaan pendapat mengenai keberadaan taklik talak ini.

Menurut Abdul Karim Amrullah, dengan adanya lembaga taklik talak dapat menolong wanita dari perbuatan kesewenang-wenangan laki-laki. Di daerah Minangkabau, dulu banyak perempuan yang di

⁷³Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah (Fiqh Muslimah)*, terjemahan Zaid Hussein al-Hamid, Cet. II, (Jakarta : Pustaka Amani, 1995, h.311 Islam tidak mengekang wanita, tetapi memberi kesempatan untuk menuntut talak di hadapan hakim seandainya ia merasakan penderitaan yang sangat berat dan tidak bisa hidup dalam naungan suami. Ia boleh meminta cerai atas dasar penderitaan ini dan hakim harus membuktikan dan menyelidiki perkaranya.

telantarkan oleh suaminya. Tidak pernah bergaul dan tidak pernah diberi nafkah oleh suami, tetapi tidak pula diceraikan.

Pada masa itu banyak di antara mereka yang murtad, maka dengan sendirinya putuslah perkawinan mereka. Hal demikian terjadi di karenakan sulitnya Hakim Agama mengabulkan gugatan perceraian dari mereka padahal mereka benar-benar di telantarkan oleh suaminya.

Pada tahun 1916, untuk membebaskan perempuan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab, atas usul Buya Hamka di daerah Minangkabau diberlakukan taklik talak.⁷⁴

Menurut Mahmoud Syaltout, dalam buku Perbandingan Mazhab dalam masalah fikih menjelaskan bahwa para ahli hukum Islam berpendapat perjanjian taklik talak bertujuan untuk melindungi kaum wanita dari kesewenangan dari pihak suami.

Suami yang mengucapkan shigat taklik talak ketika akad nikah dalam bentuk perjanjian yang telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka isteri dapat mengajukan gugatan permohonan cerai kepada pengadilan Agama yang berwenang dengan alasan pelanggaran taklik talak.⁷⁵

⁷⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1981), h.71

⁷⁵ Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia (Peradilan Agama Islam di Indonesia)*, terjemahan H. Zaini Ahmad Noeh, Cet. II, (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), h.4

Untuk kemaslahatan dalam perkawinan eksistensi taklik talak sangatlah penting.⁷⁶

Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa perceraian yang baik itu ibarat suatu kelahiran yang normal, yang berlangsung sendirinya secara normal, bukan perceraian yang terjadi di karenakan seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak pula menceraikan isterinya.⁷⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita pahami bahwa eksistensi taklik talak sangatlah penting mengingat eksistensi taklik talak yang sudah ditopang oleh kekuatan hukum yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam serta pengaruhnya terhadap keberadaan wanita menambah pentingnya arti taklik talak dalam kehidupan rumah tangga.

Kedudukan wanita akan lebih berarti karena akan terhindar dari sikap kesewenang-wenangan suami, tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga akan lebih dihargai dan pada akhirnya tentunya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

5. Taklik Talak di Tinjau dari segi Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam Taklik Talak merupakan sebuah perjanjian hal ini berdasarkan penjelasan dari Peraturan Menteri Agama bahwa taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Seperti yang di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

⁷⁶ Murtadha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, terjemahan M. Hashem, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1997), h.197

⁷⁷ *Ibid*, h.198

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perkawinan dalam bentuk :

- a. Taklik talak.
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian dilanjutkan pada pasal 46 yang berbunyi:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila yang di isyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Isteri harus mengadakan persoalannya ke Pengadilan Agama;
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak telah di perjanjikan tidak dapat di cabut kembali.⁷⁸

Pada ayat nomor 2 (dua) Pasal 46 di tegaskan kembali oleh Pasal 51 yang berbunyi:

“ bahwa pelanggaran perjanjian tersebut memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan Agama”

Berkenaan dengan perceraian KHI menyebutkan bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Dengan kata lain apabila pada saat sesudah ijab qabul suami telah mengucapkan shigat taklik talak, kemudian hal-hal yang telah diucapkan terjadi dan isteri tidak ridho maka tidak dengan sendirinya talak jatuh, namun isteri harus mengadakan

⁷⁸ Undang- Undang Perkawinan di Indonesia, Di Lengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Surabaya: Arloka), h. 193

halnya ke Pengadilan Agama yang berwenang dan apabila halnya itu terbukti dengan bukti-bukti secara formil dan materil maka Pengadilan Agama berhak untuk memutus perkawinannya tersebut.



BAB III

PUTUSAN PENGADILAN KELAS IA TANJUNG KARANG TENTANG PELANGGARAN TAKLIK TALAK

A. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama dalam perkara Taklik Talak

Peradilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi dari salah satu dari empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan Kehakiman yang ada di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁷⁹

Pengadilan Agama memiliki dua kekuasaan yaitu kekuasaan relative dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, misalnya Pengadilan Agama Kolianda dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang. Sedangkan kekuasaan absolut diartikan kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, misalnya yaitu Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum.

Pada Pasal 49 dan 50 UU Nomor 1 Tahun 1989, dijelaskan:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:
 - a) Perkawinan;
 - b) Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c) Wakaf dan shadaqoh.

⁷⁹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peadilan Agama* (Edisi Baru), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), h.5

- d) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai Perkawinan yang berlaku.
- e) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Mengenai perkara perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah:

- 
- 1. Istem lebih dari seorang;
 - 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
 - 3. Dispensasi kawin;
 - 4. Pencegahan perkawinan;
 - 5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
 - 6. Pembatalan perkawinan;
 - 7. Gugatan kelafian atas suami atau isteri;
 - 8. Perceraian karena talak;
 - 9. Gugatan perceraian;
 - 10. Penyelesaian harta bersama;
 - 11. Mengenai pengusaan anak;
 - 12. Ibu dapat menikul pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
 - 13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
 - 14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
 - 15. Putusan tentang pencabutan hak orang tua;
 - 16. Pencabuta kekuasaan wali;
 - 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali di cabut;

18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁸⁰

Sehubungan dengan jenis-jenis perkara di bidang perkawinan di atas yang menyangkut dengan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian yaitu terdapat pada gugatan perceraian nomor 9 pada UU No 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh isteri kepada Pengadilan Agama, dengan itu Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara mengenai perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak karena sudah menjadi kekuasaan relative dan kekuasaan absolut Pengadilan Agama.

B. Gugatan tentang pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang

1. Kasus posisi gugatan perkara No.0228/Pdt.G/2012/PA.Tnk

Penggugat dalam surat gugatannya 08 Februari 2012 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Register Nomor: 0228/Pdt.G/2012/PA.Tnk, tanggal 08 Maret 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya di laksanakan pada tanggal 20 Mei, di

⁸⁰ *Ibid*, h. 30-31

rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat maskawin berupa alat shalat di bayar tunai yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung sebaga bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/37/V/1999, tertanggal 27 mei 1999, yang di dikeluarkan oleh KUA Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;

2. Bahwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang isinya sebagai mana yang tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai tiga orang anak bernama:
 - 1) ANAK KE-1, umur 12 tahun,
 - 2) ANAK KE-2, umur 10 tahun,
 - 3) ANAK KE-3, Umur 4 tahun.Anak-anak tersebut saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung selama lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah rumah kontrakan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung sampai dengan bulan September 2009;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan maret

2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

- 1) Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
- 2) Tergugat sering pergi berbulan-bulan dengan alasan bekerja tanpa kabar berita;
- 3) Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tanpa nafkah lahir batin dan kabar berita sampai dengan sekarang;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2009 dengan sebab Tergugat meminta uang terhadap Penggugat dengan alasan ingin pergi kerja lagi tetapi Penggugat menyarankan untuk bekerja di Lampung saja karena selama Tergugat pergi juga tidak pernah mengirimkan nafkah lebih baik kerja dekat dengan keluarga dan anak-anak tetapi Tergugat tidak terima dan tetap pergi yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin;
8. Bahwa dengan itu sudah jelas-jelas Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang di ucapkan sesudah akad nikah angka 1, 2, dan 4;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ketempat keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan meminta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan perkara biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.⁸¹

**2. Kasus posisi gugatan perkara
No.1058/Pdt.G/2013/PA.Tnk**

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Register Nomor: 1058/Pdt.G/2013/PA.Tnk tanggal 12 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah yang nikahnya di dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2006 di rumah kakek Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat mas kawin berupa uang Rp. 50.000,-

⁸¹ Putusan Mahkamah Agung, putusan.MahkamahAgung.go.id, h.2-5 dari 14_Putusan No: 0228/ Pdt. G/ 2012/ PA. Tnk

tunai yang di catat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Timur sebagaimana bukti berupa kutipan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 629/29/2007, tertanggal 02 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung ;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri(bakda dukhul), dan telah di karuhun satu orang anak, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakek Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2007;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada bulan Agustus 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan hendak pergi mencari pekerjaan, namun sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah kembali dan tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di luar maupun di dalam Wilayah Hukum Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kakek Peggugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin;
7. Bahwa karena itu jelas-jelas Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang di ucapkan sesudah akad nikah angka 1, 2, dan 4;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ke tempat saudara Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
10. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dengan Nomor Register: 0474/Pdt.G/2013/PA.Tnk, tanggal 08 Mei, akan tetapi perkara Penggugat gugur;

Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan jatuh talak satu khulu' dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.⁸²

**3. Kasus posisi gugatan perkara
No.0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk**

Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam register Nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk, tanggal 14 April 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

⁸² Putusan Mahkamah Agung, putusan.MahkamahAgung.go.id, h. 1-3 dari 10_Putusan No: 1058/ Pdt. G/ 2013/ PA. Tnk

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, dengan wali orang tua kandung Penggugat, mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/55/III/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, tanggal 11 Maret 2002;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, serta sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) ANAK KE-1, lahir tanggal 12 April 2003.
 - 2) ANAK KE-2, lahir tanggal 8 Mei 2004.
 - 3) ANAK KE-3, lahir tanggal 29 April 2007;

Anak-anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan damai, namun kerukunan tersebut tidak berjalan lama, ketika lahirnya anak pertama pada tahun 2003, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah

dan terjadi perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya adalah :

- 1) Tergugat malas mencari pekerjaan yang berakibat keadaan ekonomi rumah tangga serba kekurangan;
- 2) Tergugat tidak mau peduli dan tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak yang namanya kasih sayang tidak ada sama sekali;
- 3) Tergugat suka pergi tanpa pamit dalam waktu yang cukup lama dan bila ditanya kemana perginya Tergugat marah dengan tidak memberitahukan dari mana Tergugat;
- 4) Tergugat banyak mempunyai hutang dan pernah menggadaikan rumah orang tua Penggugat kepada rentenir tanpa kompromi terlebih dahulu, dan yang melunasi hutang-hutang Tergugat tersebut adalah keluarga Penggugat;
- 5) Tergugat sangat tertutup tentang kepribadiannya sehingga sulit untuk diajak kompromi untuk mencari jalan keluarnya dalam mengatasi masalah hidup yang serba kekurangan;
6. Bahwa walaupun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serba kekurangan sedangkan Tergugat tetap tidak mau berusaha, terpaksa Penggugat yang berusaha mencari pekerjaan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dibantu pula oleh orang tua Penggugat, hal tersebut berjalan cukup lama yaitu sampai lahirnya anak yang ketiga;
7. Bahwa puncak pertengkaran atau percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2007, atau anak nomor 3 berumur 5 bulan, ketika itu Tergugat pamit kepada Penggugat mau main dan cari pekerjaan, setelah sore hari Tergugat menghubungi tetangga dengan memberitahu bahwa



Tergugat ada di Jakarta, setelah 3 bulan dari kepergian Tergugat masih memberi kabar kepada Penggugat akan tetapi tidak memberitahukan dimana tinggalnya, dan terakhir Tergugat menghubungi Penggugat via telepon yang memberitahukan bahwa Tergugat akan menikah dengan orang Madura dan kita tidak ada hubungan apa-apa lagi;

8. Bahwa selama kurun waktu 7 tahun kepergian Tergugat dengan tidak diketahui dimana keberadaannya, pernah Penggugat dan keluarga Penggugat mencari Tergugat dengan mendatangi tempat tinggal Tergugat dan orang tuanya sebelum menikah dengan Penggugat, akan tetapi rumah di alamat tersebut telah ditempati orang lain dan atau telah dijual oleh orang tua Tergugat;
9. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut telah nyatanya Tergugat telah melanggar janji sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat karena telah 7 tahun lebih Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan anak-anaknya, lagi pula keadaan Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atas hal tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak rela akan perlakuan Tergugat, maka cukup ber alasan hukum Penggugat menggugat cerai Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk minta bantuan kepada keluarga Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut, hasilnya terserah Penggugat;
11. Bahwa dengan telah adanya perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang C.q Majelis

Hakim sidang yang memeriksa dan mengadili atas perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.⁸³



⁸³ Putusan Mahkamah Agung, putusan.MahkamahAgung.go.id, h. 1-4 dari 11_Putusan No: Putusan No. 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk



BAB IV

ANALISIS KHI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG

Setelah mengikuti duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam perkara Gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak yang diteliti, dapat diketahui dasar hukum putusan Hakim sebagai berikut:

A. Dasar Pertimbangan Hukum/ Yuridis

1. Perkara No: 0228/Pdt.G/2012/PA.Tnk dalam alasan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, Tergugat sering pergi berbulan-bulan dengan alasan bekerja tanpa kabar berita, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 6(enam) bulan tanpa nakhah lahir batin dan kabar berita sampai dengan sekarang.

Bahwa dengan itu sudah jelas-jelas Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang di ucapkan sesudah akad nikah angka 1, 2 dan 4 yaitu:

1. Meninggalkan isteri saya enam bulan berturut-turut;
 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 3. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.
2. Pada perkara No.1058/Pdt.G/2013/PA.Tnk dalam alasan Penggugat disebutkan bahwa:
 - a. Pada bulan Agustus 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan hendak pergi mencari pekerjaan, namun sejak saat itu pula Tergugat tidak

pernah kembali dan tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di luar maupun di dalam Wilayah Hukum Republik Indonesia yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin.

- b. Bahwa karena itu jelas-jelas Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang di ucapkan sesudah akad nikah angka 1, 2, dan 4;
 - c. Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - d. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Pengugat menderita lahir dan batin;
 - e. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dengan Nomor Register: 0474/Pdt.G/2013/PA.Tnk, tanggal 08 mei 2013, akan tetapi perkara Penggugat gugur.
3. Pada perkara No.0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk dalam alasan Penggugat disebutkan bahwa:
- a. Pada tahun 2003, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat malas mencari pekerjaan yang berakibat keadaan ekonomi rumah tangga serba kekurangan;
 - Tergugat tidak mau peduli dan tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak yang namanya kasih sayang tidak ada sama sekali;
 - Tergugat suka pergi tanpa pamit dalam waktu yang cukup lama dan bila ditanya kemana perginya Tergugat marah dengan tidak memberitahukan dari mana Tergugat;
 - Tergugat banyak mempunyai hutang dan pernah menggadaikan rumah orang tua Penggugat kepada rentenir tanpa kompromi terlebih dahulu,

dan yang melunasi hutang-hutang Tergugat tersebut adalah keluarga Penggugat;

- Tergugat sangat tertutup tentang kepribadiannya sehingga sulit untuk diajak kompromi untuk mencari jalan keluarnya dalam mengatasi masalah hidup yang serba kekurangan.
- b. Pada pertengahan tahun 2007 ketika itu Tergugat pamit kepada Penggugat mau main dan mencari pekerjaan, setelah sore hari Tergugat menghubungi tetangga dengan memberitahu bahwa Tergugat ada di Jakarta, setelah 3 bulan dari kepergian Tergugat masih memberi kabar kepada Penggugat akan tetapi tidak memberitahukan dimana tinggalnya, dan terakhir Tergugat menghubungi Penggugat via telepon yang memberitahukan bahwa Tergugat akan menikah dengan orang Madura dan kita tidak ada hubungan apa-apa lagi;
- c. Bahwa selama kurun waktu 7 tahun kepergian Tergugat dengan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- d. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut telah nyata-nyata Tergugat telah melanggar janji sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat karena telah 7 tahun lebih Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat dan anak-anaknya, lagi pula keadaan Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atas hal tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak rela akan perlakuan Tergugat, maka cukup beralasan hukum Penggugat menggugat cerai Tergugat.

B. Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Putusan Hakim Mengenai Pelanggaran Taklik Talak

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai perkara pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian, dapat di analisis sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan dan pertimbangan hakim di Pengadilan alam memutuskan perkara gugatan perceraian, penulis merangkumnya dalam hal berikut:

“Menimbang bahwa selain hal-hal yang telah dikemukakan pada perkara-perkara diatas, berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula menurut pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penjelasannya suami berkewajiban menanggung nafkah, kiwa, dan tempat kediaman bagi isterinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak-anak namun berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya dan selama ini tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin karena patut dinyatakan Tergugat merupakan tipe suami yang tidak bertanggung jawab dan telah melanggar kewajibannya.

Bahkan pada perkara No 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk pada poin no 2 tertera bahwa suami Penggugat telah menikah kembali.

Berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah ayat 1, 2, 4, dan Penggugat menyatakan tidak ridho atas perlakuan Tergugat serta membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tebusan pelanggaran shigat taklik talak.

Mengenai hal ini, kaitannya dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

”درءالمفسادمقدم على جلب المصالح”

“ Menolak atau menghindari mafsadah (kesulitan) lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”⁸⁴

Kaidah ini bisa digunakan atau dijadikan dasar hukum apabila menghadapi situasi atau kesulitan dalam mengambil keputusan apakah menolak mafsadah atau megambil masalah.

Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus di pilih maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari pada meraih masalah, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan suatu kemaslahatan.

Pada perkara ini isteri ada didalam dua pilihan. *Pertama*, tetap melangsungkan bahtera pernikahan dengan situsai suami tidak lagi memberi nafkah baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin dan bahkan suami sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tidak diketahui keberadaannya. *Kedua* mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama agar dapat jatuh talak kuli padanya sehingga tidak ada keterikatan lagi antara keduanya dan isteri tidak menanggung beban karena tidak ada kepastian dari suami.

Secara psikologis semua wanita akan merasa sakit hati dengan terjadinya perceraian di dalam rumah tangganya, namun apabila dengan tetap mempertahankan rumah tangganya malah semakin membuat wanita tersebut semakin sakit dan bahkan depresi karena kesewenangan atau prilaku suaminya, bahkan lebih lebih hal itu akan berdampak bagi perkembangan anaknya, maka walaupun sesungguhnya baik dalam hukum Islam maupun hukum Positif mempersempit akan adanya perceraian namun

dalam hal ini untuk menjaga kedudukan wanita dan keberlangsungan hidup wanita tersebut maka Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang memustukan gugat cerai Penggugat jatuh talak 1 kul'i terhadapnya setelah ia membayar iwadl.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan Hakim pada putusan perkara No: 0228/Pdt.G/2012/PA.Tnk, perkara No.1058/Pdt.G/2013/PA.Tnk, dan perkara No.0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk bahwa selain hal-hal yang telah dikemukakan pada perkara-perkara diatas, berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula menurut Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penjelasannya suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswa, dan tempat kediaman bagi isterinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, namun berdasarkan fakta sebagaimana terura di atas Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya dan selama ini tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin karena patut dinyatakan Tergugat merupakan tipe suami yang tidak bertanggung jawab dan telah melalaikan kewajibannya.
2. Taklik talak dalam KHI diatur Pasal 45 dan 46 secara khusus. Pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : (a). Taklik talak, (b). Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mengenai taklik talak analisis yang terkait dengan 3 putusan di atas, dapat di ketahui berdasarkan dengan alasan-alasan Penggugat, Tergugat sudah melanggar shigat taklik talak yang di ucapkan sesaat setelah akad nikah. Sesuai dengan bukti dan saksi-saksi yang memenuhi syarat, dan hal-hal lain yang menjadi

pertimbangan Hakim maka suami terbukti telah melanggar shigat taklik talak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, Pasal 116 huruf g dan Pasal 51.

Berdasarkan hal-hal di atas jelas shigat taklik talak yang di ucapkan suami sesaat setelah akad nikah memberikan dampak hukum dan Perempuan dilindungi dengan taklik talak yang memiliki kekuatan hukum dan apabila suami telah melanggar taklik talak tersebut, maka isteri berhak mengajukan halnya ke Pengadilan Agama yang berwenang.

B. Saran

Dengan adanya berbagai putusan yang di putuskan oleh Pengadilan Agama mengenai perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak, ada beberapa saran atau masukan dari penulis yaitu:

1. Mengenai masalah taklik talak perlu diadakannya sosialisasi sehingga baik pengantin wanita dan pengantin pria tahu arti penting dalam pembacaan shigat taklik talak dan apa akibat hukumnya.
2. Diharapkan Hakim lebih peka, perlu sikap kehati-hatian dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan taklik talak ini, perlu di teliti terlebih dahulu apakah ketika setelah diucapkan akad perkawinan suami benar-benar membaca shigat taklik talak dan mengetahui akibat hukum dari pembacaan shigat taklik talak tersebut karena pada dasarnya taklik talak di adakan bukan untuk memisahkan perkawinan melainkan melindungi isteri dari kesewenangan dari pihak suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (khitbah, nikah dan talak)*, Jakarta: amzah, 2014
- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang Mangu Peradilan yang Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Al-qur'an terjemah*, Kementerian Agama RI, Syigma, Bogor, 2007
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2015
- Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, cet ke-II, 2012
- Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Hafidz bin Hajar Asqolani, *Bulughul Marram*, 377-388H
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, cet ke-1
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4, Departemen Pendidikan Nasional

M .Yahya Harahap, *Tinjauan Masalah Perceraian Di Indonesia*, FH-UI, Jakarta: 1989

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, volume 2, Ciputat: Lentera Hati, 2000

Mahmoud Syaltut, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, terjemahan Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam (Menurut Madzhab Syafi'Al-Hanafi, Maliki, Hambali)*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet Ke-12,1990

Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Putusan Di Pengadilan Agama*, CV. Diponegoro, Bandung: 1991

Muhammad Abdulkadir, *Hukum perdata indonesia*, cet ke-4. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010

Muhammad Bagir Al-hasby, *fiqh praktis (Menurut Al-qur'an, As-sunnah, dan Pendapat para Ulama)*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet Ke- 1, 2002

Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta: 2010

Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peadilan Agama* (Edisi Baru), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991

Sayid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 8, Terjemahan Mohamad Thalib*, Bandung: Al- Maarif, 1980

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974

Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung: 2007

Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat (kajian fikih nikah lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, 1980



